

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA TANJUNG PERADA KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG

Jhony Fredy Hahury

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: jf28hahury@gmail.com

Abstract : *This study aims to identify and describe the implementation of the Cash Transfer Assistance Program (Bantuan Langsung Tunai/BLT) in Tanjung Perada Village, Tempunak District. The research method employed is a qualitative descriptive approach. The research subjects consist of the Village Secretary, the Head of Community Welfare Affairs, hamlet heads, and families receiving BLT assistance. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of the BLT Program is carried out through socialization activities intended to provide the community with an understanding of the objectives and benefits of the program. This socialization aims to build public awareness of the substance of the policy so as to support optimal policy implementation. In addition to budgetary support, the success of program implementation is also determined by the availability of human resources, particularly village officials who are directly involved in implementing the program. Without adequate resource support, well-formulated public policies may face obstacles and fail to achieve their intended objectives.*

Keywords: *Implementation, Cash Transfer Assistance*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung Perada, Kecamatan Tempunak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian terdiri atas Sekretaris Desa, Kaur Kesejahteraan Rakyat, kepala dusun, serta keluarga penerima BLT. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BLT dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat program. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Selain dukungan anggaran, keberhasilan implementasi program juga ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang berperan langsung dalam pelaksanaan program. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan publik yang telah dirumuskan dengan baik berpotensi mengalami kendala dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan langsung Tunai

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan pemerintah berupa transfer tunai langsung kepada masyarakat miskin atau rentan yang

bertujuan untuk meringankan beban ekonomi penerima manfaat, terutama dalam situasi darurat, seperti pandemi atau krisis ekonomi. Konsep implementasi BLT melibatkan beberapa tahap kunci, mulai dari identifikasi

penerima manfaat hingga pencairan bantuan.

Pandemi covid-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat desa yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan akibat pembatasan aktivitas ekonomi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di desa adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Program BLT Dana Desa dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, khususnya yang terdampak kondisi ekonomi tidak stabil, agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak.

Desa Tanjung Perada merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang yang memiliki tiga dusun yakni dusun peninjau, dusun kantuk hilir, dan dusun tudam jaya. Berdasarkan data profil desa jumlah penduduk 1.039 orang dengan Kepala Keluarga (KK) sebanyak 301. Penduduk yang terdiri jumlah laki-laki 519 dan jumlah perempuan 520 orang. Dengan jumlah penduduk sudah tentu menjadi tugas dan kewenangan kepala desa dan perangkatnya harus mampu

melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa penerima Bantuan tunai berjumlah 13 Kepala Keluarga di Desa Tanjung Perada. Hal ini menunjukkan bahwa penerima manfaat masih banyak serta tujuan pemberian bantuan ini dapat mengangkat ekonomi masyarakat secara baik. Dengan demikian menjadi perhatian pemerintah desa agar keluarga penerima manfaat dapat menggunakannya secara efisien. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa melakukan sosialisasi pertiga bulan sebelum penerima manfaat mendapatkan bantuan langsung tunai.

Secara sosial ekonomi, sebagian masyarakat desa masih bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Kondisi ini menyebabkan sebagian rumah tangga mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga program BLT menjadi sangat relevan sebagai bentuk perlindungan sosial.

Implementasi Program BLT menjadi solusi dan menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang. Berdasarkan uraian di atas, maka hal inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak

Kabupaten Sintang dengan indikator pada sosialisasi dan Sumberdaya manusia.

Berkaitan dengan implementasi tentunya orientasinya untuk efektivitas sebuah program. Sebagaimana menurut Tangkilisan (2003:17) “implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya”.

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Wahab (2018:135), implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta mekanisme administratif guna menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut Dwiyanto (2017:89) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan kapasitas pelaksana di lapangan.

Model implementasi kebijakan yang banyak digunakan adalah model Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi,

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Menurut Subarsono (2011), keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan memastikan kebijakan dipahami dengan benar, sementara sumber daya yang memadai akan mendukung kelancaran pelaksanaan.

Sosialisasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi mengenai kebijakan publik kepada masyarakat agar memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Dalam konteks administrasi publik, sosialisasi kebijakan bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Subarsono, (2011:93) menjelaskan bahwa sosialisasi kebijakan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti media komunikasi, isi pesan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Mulyadi (2018:74), sosialisasi kebijakan bertujuan untuk membangun pemahaman publik mengenai substansi kebijakan, tujuan kebijakan, serta peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Tahapan sosialisasi kebijakan meliputi beberapa langkah penting, yang menurut Mustopadidjaja (2012:31), yakni sebagai berikut :

- a. Perumusan Pesan: Merancang pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- b. Penentuan Media Sosialisasi: Memilih media yang tepat, seperti media sosial, iklan layanan masyarakat, seminar, atau diskusi publik.

- c. Implementasi Sosialisasi: Menyampaikan pesan melalui media yang sudah dipilih dan melakukan komunikasi dengan masyarakat secara langsung atau tidak langsung.
- d. Evaluasi Sosialisasi: Mengukur sejauh mana pesan kebijakan telah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks kebijakan bantuan sosial di desa, sosialisasi berfungsi untuk menjelaskan kriteria penerima manfaat, mekanisme penyaluran, serta tujuan program.

Implementasi kebijakan memerlukan Sumber daya. Oleh karena itu, sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sebagaimana Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, menurut Widodo (2010:98) Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (*staff*) implementasi kebijakan tidak akan

berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

- b. Anggaran (*budgetary*). Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Fasilitas (*facility*). Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
- d. Informasi dan Kewenangan (*information and authority*). Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagaimana Sugiyono (2005:20) menyatakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Sekretaris Desa, Kaur Kesra, Kepala dusun dan Keluarga Penerima BLT di Desa Tanjung Perada Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dalam Implementasi kebijakan merupakan bentuk komunikasi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dari semua para pelaksana di pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Tujuan BLT adalah mencegah kerentanan sosial ekonomi yang lebih besar akibat kehilangan pekerjaan, pengurangan pendapatan, atau inflasi harga kebutuhan pokok.

Hasil wawancara dengan warga yang mendapatkan bantuan bahwa bantuan BLT ini sangat membantu dan

dapat belanja kebutuhan pokok yang diperlukan. Hal dapat mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dengan menyalurkan bantuan secara adil dan merata keluarga-keluarga miskin yang paling membutuhkan.

Selanjutnya hasil wawancara bahwa dengan bantuan tunai yang cepat dan langsung, diharapkan masyarakat tetap merasa terlindungi dan percaya kepada peran pemerintah desa dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial. Agar tujuan dan sasaran program tercapai dengan maksimal, maka diperlukan mekanisme penyaluran yang transparan, akuntabel, dan cepat.

Sosialisasi dilakukan agar menyatukan persepsi yang sesuai, sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa strategi penyaluran bantuan BLT meliputi Pendataan dengan mengecek data dengan data dari desa, verifikasi dan Validasi Data Penerima melibatkan perangkat desa, RT/RW dan kepala dusun agar bantuan tidak salah sasaran.

Tujuan dan sasaran program ini tentunya diharapkan maksimal dalam meningkatkan pelayanan dengan mudah dan membina masyarakat agar dapat mandiri. Kerjasama dan partisipasi dari semua pihak yang ada di desa sangat membantu tercapainya tujuan dari program BLT ini dan mengurangi hambatan dalam setiap kegiatan seperti data penerima manfaat.

Sosialisasi penting dilaksanakan untuk mengetahui apa tujuan dan manfaat dari bantuan langsung tunai yang ada di Desa Tanjung Perada. Oleh karena itu, dalam implementasi

kebijakan komunikasi menjadi modal pendukung dalam pelaksanaan kebijakan.

Sosialisasi sebagai proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur dijelaskan bahwa sasaran dari implementasi dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan terutama kepada warga yang menerima bantuan. Utamanya implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan sehingga dengan usaha-usaha tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurut hasil observasi penulis bahwa dalam kegiatan sosialisasi dijelaskan yang dilakukan oleh perangkat desa sudah baik dan bermanfaat bagi warga dan memahami tentang pelayanan bantuan langsung tunai serta persyaratan-persyaratan penerima manfaat sehingga mudah dipahami dan diikuti untuk memenuhi data desa tersebut.

Implementasi dikatakan berhasil apabila didukung dengan sumberdaya yang baik dana, fasilitas dan sumberdaya manusia. Sumberdaya dalam melaksanakan setiap program yang dilaksanakan sangat menunjang keberhasilan program yang dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan Subjek penelitian bahwa kehadiran perangkat desa menjadi penting dalam membantu tugas-tugas pemerintahan desa, salah

satunya adalah membantu melaksanakan program BLT. Ditegaskan oleh Sekretaris Desa bahwa perangkat desa memiliki peran penting dalam melakukan kerjasama dan komunikasi dalam pelaksanaan penyaluran BLT kepada masyarakat. Oleh karena itu, selain sumber daya perangkat desa tentunya ditunjang dengan fasilitas seperti tempat yang digunakan dalam sosialisasi maupun kenadaraan yang digunakan. Sumber daya akan menjadi modal terpenting dalam pelaksanaan program BLT sehingga dapat meningkatkan akses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) diperlukan kesiapan dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di berbagai tingkatan. Penyaluran BLT, mulai dari pendataan calon penerima, verifikasi data, distribusi bantuan, hingga pelaporan dan evaluasi. Oleh karena itu, kualitas dan kapasitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa sumberdaya manusia perangkat desa dalam penyaluran BLT bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang baik dalam peningkatan efektivitas penyaluran.

Beberapa kendala dalam impementasi BLT yakni kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pemahaman program. Dalam konteks ini, perangkat desa yang harus banyak melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi yang merata agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan sosialisasi berfungsi mengurangi

kecemburuan sosial serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat digambarkan bahwa implementasi program bantuan langsung tunai dilakukan dengan sosialisasi program oleh perangkat desa kepada warga masyarakat berkaitan dengan persyaratan, data warga, dan mekanisme penyaluran. Sosialisasi sebagai bagian dari pemberian informasi agar partisipasi aktif dari masyarakat. Sosialisasi program juga didukung dengan sumberdaya perangkat desa yang turun langsung kepada warga untuk mendata warga penerima bantuan. Beberapa kendala dalam implementasi program ini yakni kurangnya kesadaran partisipasi dalam mengikuti sosialisasi sehingga perangkat desa dan kepala dusun selalu kerja keras dalam memberikan informasi terkait penyaluran BLT kepada warga setiap bulan. Tanpa dukungan perangkat desa, dan Dusun yang memadai program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran program BLT di Desa Tanjung Perada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan tentang implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Tanjung Perada bahwa sosialisasi program secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih menghadapi kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya khususnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti

sosialisasi program. Sosialisasi, mencakup tujuan program, kriteria penerima manfaat, serta mekanisme penyaluran bantuan. Sementara ditinjau dari sumber daya, implementasi program BLT harus didukung oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki pemerintah desa. Sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan BLT, seperti perangkat desa, pada dasarnya telah berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa sosialisasi program harus dirancang dengan baik agar kedepan masyarakat bisa aktif dalam mengikutinya dan sumberdaya harus diperkuat lagi dengan koordinasi dan kerjasama agar kedepan berjalan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mulyadi, 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustopadidjaja, 2012. *Manajemen Proses Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja)*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho, 2018. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang *Pengalokasian Dana Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024*.

- Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.
- Wahab, S. A. 2018. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.